

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah sosial dan ekonomi yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang salah satu permasalahan kemiskinan yang ada di negara Indonesia, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang *multidimensional*. Kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai tempat berteduh. Kemiskinan telah membatasi kesempatan bagi suatu masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai manusia untuk memperoleh akses kebutuhan hidup yang layak. Ada banyak aspek yang melatarbelakangi kemiskinan salah satunya adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat diartikan sebagai ketidaksamaan diantara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan individu dan perekonomian disuatu negara. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan diantaranya adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah (Khoerudin, 2016:163).

Pada dasarnya setiap negara pasti memiliki tanggung jawab, tugas dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan masing-masing negara akan berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh tata nilai sosial, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari negara tersebut. Tujuan negara menurut *Welfare State* yaitu negara berperan sebagai alat untuk tercapainya tujuan bersama yaitu kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan ini, Indonesia yang merupakan salah satu negara berdaulat memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang tertuang dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin dalam tujuan Indonesia ini yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dimana negara ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada rakyatnya terutama dalam hal kesejahteraan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional diketahui jumlah masyarakat miskin di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah masyarakat miskin
1	2018	26,67
2	2019	24,79
3	2020	26,42

Sumber:Badan Pusat Statistik Nasional (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 26,67 juta orang dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,92 persen sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan 0,36 persen dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020, tercatat sebesar 26,42 dari jumlah masyarakat Indonesia yaitu 272.229.372 orang ([www. Bps. go.id](http://www.Bps.go.id)).

Dalam menanggulangi kemiskinan Pemerintah telah mengeluarkan program-program guna membantu perekonomian masyarakat salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan pada tahun 2017, program ini merupakan bentuk perubahan dari program rasta dan raskin dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos sehingga lebih tepat sasaran serta mendorong tercapainya keuangan inklusif di masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.. Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 200.000/KPM, melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu seperti bank BRI, MANDIRI, BNI, BTN. Dengan mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan pada tempat yang telah bekerjasama dengan Himbara yang kemudian disebut E-warong. Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat, memberikan bahan pangan kepada KPM BPNT dengan gizi seimbang, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, serta tepat administrasi kepada KPM BPNT dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria daerah tersebut harus bisa tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi dan/atau terdapat E-warong. Dengan mekanisme penyaluran BPNT yang dilakukan melalui tahapan registrasi dan/atau pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran dan pembelian barang dan barang yang dibeli harus memenuhi unsur karbohidrat, mineral dan vitamin. Dalam penyaluran BPNT yang hanya bisa di tukarkan pada toko yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau yang sudah bekerja sama dengan bank himbaran yaitu E-warong sebagai penyalur BPNT yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyalur di Kabupaten Banyumas menggunakan bank Mandiri yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam penyaluran bantuan BPNT.

Menurut BPS Kabupaten Banyumas jumlah masyarakat Banyumas per tahun 2021 adalah 1.776.918 juta jiwa sedangkan jumlah masyarakat miskin di Banyumas pada tahun 2020 adalah 225,84 ribu jiwa. Kabupaten Banyumas memiliki 301 Desa salah satu desa yang menerapkan BPNT di Kabupaten Banyumas adalah di Desa Tambaksogra kecamatan Sumbang. Dengan jumlah penduduk di Desa Tambaksogra 8.272 jiwa dan jumlah masyarakat miskin sebesar 4.294 dengan jumlah penerima BPNT sebesar 906 KPM pada tahun 2020. Di bawah ini merupakan data penerima BPNT dari tahun 2018-2020 di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang :

Tabel 1.2. Data Penerima BPNT di Desa Tambaksogra dari tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Penerima
1.	2018	823
2.	2019	859
3.	2020	906

Sumber:Data Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang tahun 2018-2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penerima BPNT di Desa Tambaksogra dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Sekitar 36 KPM pada tahun 2018-2019 dan 47 KPM pada tahun 2019-2020. Yang terbagi dalam 6 RW dan setiap RW nya bervariasi dalam jumlah masyarakat penerima bantuan BPNT yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. jumlah masyarakat miskin dan penerima BPNT Tahun 2020 per-RW

RW	Jumlah Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin	Jumlah Penerima BPNT
1	1.476	573	162
2	2.432	1426	153
3	1.204	678	148
4	1.608	946	178
5	1.276	548	147
6	276	123	118
Jumlah	8.272	4.294	906

Sumber: Data Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Tahun 2020

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin di Desa Tambaksogra berjumlah lebih dari setengah jumlah keseluruhan masyarakat Desa Tambaksogra, artinya lebih dari setengah masyarakat Desa Tambaksogra tergolong sebagai masyarakat miskin dan jumlahnya KPM BPNT bervariasi di setiap RW.

Berdasarkan hasil prasurvey peneliti mendapatkan data tentang pembagian BPNT setiap bulannya di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang pada tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 1.4. Data Ketepatan Waktu Pembagian BPNT

Tahun	Bulan	Jumlah Penerima BPNT
2020	Januari	898 KPM
	Februari	-
	Maret	-
	April	-
	Mei	898
	Juni	906

Juli	883
Agustus	-
September	758
Oktober	902
November	-
Desember	906

Sumber: Data E-warong Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pembagian BPNT belum terlaksana setiap bulanya, seperti pada bulan Februari sampai April dirangkap pada bulan Mei dan bulan Agustus dirangkap menjadi bulan September dan jumlah penerima setiap bulanya berbeda.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘‘Analisis Pelaksanaa Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Lokasi

Penelitian dilakukan di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

2. Dimensi Waktu

Penelitian menggunakan data dari tahun 2018-2021

3. Dimensi Studi

Dimensi studi dibatasi pada :

Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan perumusan masalahnya sebagai berikut : Bagaimanakah Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis bagi perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan administrasi negara secara khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.